

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat di era digital ini memberikan kemudahan dan efisiensi terhadap segala aktivitas kehidupan manusia salah satunya adalah internet, dengan banyaknya penggunaan internet pada masa sekarang Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pun mulai mengurangi penggunaan penggunaan dokumen fisik dan mulai mengalihkan pelayanannya yang pada awalnya secara konvensional menjadi terintegrasi oleh perangkat elektronik tanpa harus bertatap muka kepada petugas yang berwenang. Hal ini masih menimbulkan polemik dan kendala bagi kalangan praktisi maupun akademisi.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan socio legal dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data primer melalui wawancara kepada praktisi, aparatur kantor pertanahan dan akademisi selaku dewan penasihan IPPAT terkait Peraturan menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020. Dengan memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan yang terintegrasi Elektronik ini dianggap bertentangan dan merugikan profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Penulis akan melakukan kajian terhadap pelayanan HT elektronik ini dimulai dari prosedur penyampaian APHT sampai pendaftaran, perbaikan data setelah terbitnya HT-el dan tanggungjawab yang membebani PPAT terkait data dokumen yang disampaikan oleh notaris.

Pelayanan HT-el ini juga menimbulkan kendala dan akibat hukum lain yang melimpahkan PPAT untuk bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul atas kesalahan pengisian data baik akibat hukumnya maupun konsekuensi kerugian materiil yang dialami.

Kata Kunci: hak tanggungan elektronik, pertanggungjawaban ppat, surat pernyataan, akibat hukum.

ABSTRACT

Rapid development of technology and communication in this digital era provides convenience and efficiency to all activities of human life, one of which is the internet, with the large number of internet use nowadays, the Ministry of Agrarian Spatial Planning / National Land Agency has begun to reduce the use of physical documents and begin to divert services that were initially conventionally integrated by electronic devices without having to meet face to face with authorized officers. This still creates polemics and obstacles for practitioners and academics.

This research was conducted using the socio legal approach and the research specification used was descriptive analytical. The data used in this study are primary, secondary and tertiary data. Primary data collection through interviews with practitioners, land office officials and academics as the IPPAT advisory board regarding the Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning / National Land Agency Number 5 of 2020. By presenting the results of research on the implementation of Integrated Electronic Mortgage services, this is considered to be contradictory and detrimental to the profession. Land Deed Making Official (PPAT).

The author will conduct a study of this electronic HT service starting from the procedure for submitting APHT to registration, correcting data after the issuance of HT-el and responsibilities that burden PPAT regarding document data submitted by notaries.

This HT-el service also creates other problem and law consequences that delegate PPAT to be responsible for all legal consequences arising from errors in filling in data, both due to the law and the consequences of material losses suffered.

Keywords: *Electronic Mortgage Rights, Land Deeds Official Accountability, statement letter, legal consequences*